
AMBIVALENSI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA: MINIMNYA INISIATIF DAN KESADARAN MASYARAKAT LOKAL MENJADI MOTOR PENGGERAK PENGEMBANGAN SUNGAI AEKSIEGAON

*Wensdy Sitindaon¹, Elvri Teresia Simbolon², Frainskoy Rio Naibaho³, Priska Silaban⁴, Tio Minar Panjaitan⁵

¹⁻⁵Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Indonesia, email: sitindaonwensdy@gmail.com

ABSTRAK**Article History****Submitted:**

18 Juni 2022

Reviewed:

18 Juli 2022

Accepted:

05 Agustus 2022

Published:

15 November 2022

Dilema pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh pemerintah kabupaten terkait dengan kewenangan pengelolaan. Pada aturan UU pengelolaan DAS sepenuhnya diserahkan pada pemerintah pusat dan Provinsi. Pada beberapa Kabupaten yang memiliki wilayah sungai, danau maupun wilayah air lainnya kesulitan melakukan intervensi kebijakan, program dan anggaran dana untuk pengembangan wilayah air. Pada penelitian ini objek wisata sungai Aeksigeaon berada tepat ditengah Kota Tarutung. Posisinya yang strategis di tengah kota cenderung terlihat terabaikan dan tidak dikelola untuk menjadi objek wisata unggul di Kota Tarutung. Masyarakat lokal yang berdekatan

dengan sungai Aeksigeaon juga jarang mendapat pelatihan, bantuan pengembangan wisata dan dana dari Pemerintah Kabupaten. Kondisi ini memperumit objek wisata sungai Aeksigeaon karena tidak ada kehadiran dari masyarakat lokal, pemerintah daerah maupun swasta yang khusus mengelolanya secara maksimal. Penelitian ini menekankan adanya pemberdayaan pada masyarakat lokal dapat menjadi motor penggerak pengembangan objek wisata sungai Aeksigeaon. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pengemabilan data melalui wawancara dan observasi langsung dengan masyarakat lokal, pedagang dan dinas pemerintah terkait.

Kata kunci: Pengembangan, pemberdayaan, daerah aliran susngai, masyarakat lokal

AMBIVALENCE OF TOURISM POTENTIAL DEVELOPMENT: LACK OF INITIATIVES AND AWARENESS OF LOCAL COMMUNITY BECOMES THE DRIVING FORCE FOR AEKSIEGAON RIVER DEVELOPMENT**ABSTRACT**

The dilemma of watershed development (DAS) by the district government is related to management authority. According to the law, watershed management is entirely left to the central and provincial governments. In several districts that have river, lake or other water areas, it is difficult to intervene in policies, programs and budget funds for the development of water areas. In this study, the Aeksigeaon river tourist attraction is located right in the middle of Tarutung City. Its strategic position in the middle of the city tends to look neglected and not managed to become a superior tourist attraction in Tarutung City. Local communities adjacent to the Aeksigeaon river also rarely receive training, tourism development assistance and funding from the District Government. This condition complicates the attraction of the Aeksigeaon river because there is no presence from the local community, local government or private sector that specifically manages it optimally. This study emphasizes that the empowerment of local communities can be a driving force for the development of Aeksigeaon river tourism objects. This study uses qualitative research with data collection through



interviews and direct observation with local communities, traders and related government agencies.

Keywords: *Development, empowerment, watershed, local community*

PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan dari World Travel and Tourism Council tahun 2018 menyatakan Indonesia dengan pertumbuhan wisata tercepat di peringkat 9 dunia. Hal ini tentu berkontribusi pada devisa negara, karena sektor pariwisata mampu menjadi 3 terbesar yang menyumbang devisa bagi Indonesia. Dalam (Sugiarto, 2019) menyatakan bahwa pada tahun 2017 sektor pariwisata telah menyumbang sekitar USD 15,20 miliar. Sumbangan dari sektor pariwisata ini tentu menjadi perhatian khusus pemerintah untuk lebih dikembangkan dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat bawah sehingga dapat bertumbuh bersama untuk kesejahteraan. Pada penelitian ini fokus pada pertumbuhan dan pengembangan sektor wisata yang ada di Tapanuli Utara khususnya Kota Tarutung. Dalam laporan dari (*Badan Pusat Statistik Tapanuli Utara*, 2019) bahwa jumlah wisatawan yang hadir ke wilayah Tapanuli Utara hanya 153.100 wisatawan. Tentu jumlah ini lebih tinggi daripada Kabupaten Simalungun tetapi Tapanuli Utara kalah jauh dengan Kabupaten Karo yang mencapai 907.500 wisatawan di tahun 2019. Margin yang terlalu lebar antara kedatangan wisatawan di Tapanuli Utara dan Kab. Karo menjadi cermin untuk membenahi diri lagi dalam sektor wisata.

Pengembangan wisata tentu tidak dapat secara mudah dilakukan dan butuh penataan terhadap tata kelola yang baik dengan sumber daya manusia yang kompeten. Penekanan pada pengelolaan dikuatkan dalam penelitian dari (Anak Agung Putu Agung, 2013; Rahayu, 2021) bahwa pariwisata dapat dikembangkan dengan adanya pengelolaan yang baik terhadap objek wisata dengan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan formal tata kelola wisata. Selaras dengan penelitian di atas maka (Pauziah, 2017; Yuliyani, 2020) menyatakan sering

kendala dalam pengelolaan tempat wisata akibat dari rendahnya SDM warga setempat dan pengelolanya. Tentu kondisi ini menjadi buruk bagi objek wisata yang diharapkan memberikan dampak ekonomi kepada warga sekitar. Pemanfaatan sungai Aeksigeaon, Kota Tarutung yang seadanya menjadi manifestasi tata kelola yang belum maksimal. Sepanjang wilayah objek wisata Sungai Aeksigeaon hidup hanya oleh sektor kuliner yang ramai (momen tertentu) karena makanan dan bukan pesona dari sungai Aeksigeaon.

Pengembangan wisata juga perlu mempertimbangkan kebutuhan terhadap fasilitas pada tempat wisata agar memberikan kenyamanan dan melayani kebutuhan wisatawan. Faktor infrastruktur menjadi kunci keberhasilan wisata sesuai dengan temuan dari penelitian dari (Darsiharjo et al., 2016; Kusriantari Fenny A, Refranisa, 2020) bahwa objek wisata perlu untuk membuat perencanaan dan ketersediaan fasilitas bagi wisatawan untuk memberikan kenyamanan. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian semua pihak terkait yang bergelut dalam dunia usaha pariwisata. Perhatian ini terlihat dari penelitian dari (Irsyad, 2020; Putryanda, 2018) yang melihat usaha pariwisata terhambat perkembangan dan keberlanjutan usahanya dikarenakan minimnya fasilitas yang tersedia. Bercermin dengan kondisi diatas menguraikan kondisi yang sedang dialami oleh objek wisata sungai Aeksigeaon di Kota Tarutung. Dalam pengamatan kasat mata dengan posisi di tengah Kota maka Aeksigeaon dapat menjadi ikon utama. Namun, sulit bagi sungai Aek Sigeaon karena masih minimnya fasilitas yang dapat melayani kebutuhan masyarakat dan wisatawan yang datang.

Keberadaan masyarakat lokal tentu tidak boleh diabaikan dan justru diberdayakan dalam kegiatan usaha wisata. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas usaha pariwisata

dijelaskan dalam penelitian dari (Renaldy et al., 2018; Saputra, 2021; Wisudawati, 2017) dimana mampu menjadi penggerak utama dalam kemajuan usaha wisata. Masyarakat lokal dapat berperan dalam menjaga kondisi keamanan, pelayanan, memberi informasi dan promosi usaha wisata. Kebermanfaatan secara ekonomi menjadi efek langsung yang dirasakan masyarakat lokal karena terbukanya peluang usaha yang menguntungkan oleh kehadiran para wisatawan. Potensi masyarakat disekitar Aeksigeaon untuk menjaga lingkungan masih sangat rendah. Kesadaran untuk menjaga kebersihan sungai Aeksigeaon dan memanfaatkan peluang ekonomi juga belum terlihat maksimal. Masyarakat lokal cenderung mengabaikan dan belum ada kelompok yang dibentuk untuk menjadi swadaya mengelola sungai Aeksigeaon.

Peran dari pemerintah sangat besar dalam usaha kegiatan usaha termasuk dalam perumusan kebijakan, dukungan dana, penyediaan infrastruktur dan promosi objek wisata ke daerah lain. Manfaat dari dukungan pemerintah dijelaskan dalam penelitian dari (Azwar, 2017; Irsyad, 2020; Purnaya, 2018) dimana setiap usaha wisata yang diselenggarakan sendiri oleh masyarakat berusaha dilirik pemerintah dan menjalin kerjasama berkelanjutan. Kebutuhan kerjasama dengan pemerintah tidak terlepas dari adanya beberapa masalah yang dihadapi masyarakat terutama dalam akses jalan, penyediaan fasilitas, prioritas wisata daerah, pelatihan dan pendanaan tempat wisata. Keseluruhan komponen diatas dapat dicapai dan lebih mudah dilakukan dengan adanya keterlibatan langsung pemerintah daerah (Pemda). Keberadaan Aeksigeaon di tengah kota justru tidak menjadikannya sebagai pariwisata prioritas, padahal konsep *waterfront city* dapat menjadi keunggulan dari Kota Tarutung dibandingkan dengan kota kabupaten lainnya. Dalam hal inilah pemda melalui dinas pariwisata dapat memperhatikan sungai Aek Sigeaon menjadi simbol baru di Kota Tarutung dalam mewujudkan wisata ramah lingkungan dan kota yang asri.

Setiap objek wisata membutuhkan karakter kuat dalam menarik minat wisatawan untuk datang dan menikmatinya. Karakter objek wisata bisa beragam mellai atraksi yang dapat ditawarkan oleh pihak pengelola dan masyarakat sekitar sehingga menjadi keunikan dengan objek wisata lainnya. Potensi melalui atraksi dijelaskan dalam penelitian dari (Muftadi, 2017; Qonita Putri Mulya, 2018; Riska Aprilia Ayuningtyas D, 2017; Saputra, 2021) menyatakan dapat berdampak besar pada ketertarikan wisatawan untuk datang ke objek wisata. Atraksi yang ditawarkan biasanya dapat seni, budaya lokal, makanan, karakter khusus (goa, sungai, danau) dan makanan khas daerah. Objek wisata sungai Aeksigeaon memiliki potensi atraksi wisata yang kuat berupa sungai di tengah kota sehingga menjadi unik dan kuat karakternya. Selain itu, kota Tarutung terkenal dengan ulos dan tarian tor-tornya yang dapat menarik minat dari wisatawan untuk berkunjung langsung atas sajian hiburan yang dapat disediakan pihak pengelola di objek wisata Aeksigeaon. Terlebih ada hasil tenun Ulos yang sudah di kenal banyak orang Indonesia sehingga menjadikan wisatawan dapat membawa souvenir saat kembali pulang.

Di atas telah diuraikan tentang beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan objek wisata Aeksigeaon di Kota Tarutung. Seluruh elemen dalam pengembangan objek wisata sungai Aeksigeaon masih berjalan sendiri-sendiri dan belum di orkestrasi untuk mencapai tujuan yang sama yaitu wisata unggulan kota Tarutung. Dalam hal ini peneliti melihat keberhasilan dari pengembangan objek wisata sungai Aeksigeaon melalui penguatan secara kelembagaan (kerjasama pemerintah) dan berkolaborasi dengan masyarakat lokal yang sudah memiliki kesadaran potensi wisata. Pemerintah daerah dapat membantu dalam melengkapi fasilitas dan membentuk pengelola serta meningkatkan sumber daya manusianya. Di sisi lain, masyarakat lokal dapat tumbuh kesadaran menjaga kebersihan, keamanan dan menawarkan beragam atraksi yang dapat ditawarkan pada wisatawan yang

ada di Sungai Sigeon. Integrasi dari pemerintah dan masyarakat lokal dalam pengembangan objek wisata Aeksigeon menjadi roda keberhasilan wisata yang ada di Kota Tarutung.

METODE

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ditujukan untuk mampu mengeksplorasi data yang dapat diperoleh dilapangan oleh peneliti. Lokasi penelitian berada pada Kota Tarutung tepatnya di wilayah objek wisata sungai Aeksigeon. Peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi dengan tahnik wawancara terstruktur dan melakukan observasi terhadap masyarakat, sungai Aeksigeon dan pihak-pihak terkait. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada keinginan peneliti untuk memperpendek jarak realitas antara peneliti dan objek yang diteliti. Peneliti melakukan pendekatan khusus untuk membangun rasa kepercayaan (trust) antara peneliti dan informan. Hal ini dilakukan agar ada kedekatan secara sosial yang memberikan kenyamanan dan keluwesan baik bagi peneliti maupun informan saat melakukan pengambilan data melalui wawancara.pernyataan diatas ditegaskan dalam buku dari (Neuman, 2002) bahwa melalui kualitatif, peneliti tidak hanya mendapatkan *surface data* tetapi mampu masuk pada kedalaman data. Kelebihan ini yang digunakan peneliti dalam merangkai beragam hasil wawancara menjadi satu kesatuan analisis yang baik nantinya.

Ketertarikan peneliti pada sungai Aeksigeon melihat posisinya yang berada pada pusat Kota dan mampu untuk menjadi keunggulan dibandingkan dengan kota lain. Hal ini juga berdekatan dengan konsep waterfront city oleh (Andrasoro, 2018) yaitu konsep pembangunan dengan kontak visual serta fisik dengan air dan bagian dari pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berdekatan dengan air. Letak aksesibilitas dan posisi yang strategis ini membuat peneliti menjadi tertarik untuk melihat kendala yang dialami oleh Kota Tarutung dalam

mengembangkan Sungai Aeksigeon. Peneliti melihat adanya kekurangan dalam menangkap potensi yang ada di warga maupun pemerintah daerah dalam memanfaatkan Sungai Aeksigeon untuk menjadi objek wisata yang murah dan nyaman. Dengan penelitian yang rigid nantinya dapat menguraikan kendala dan hambatan yang dialami oleh masyarakat lokal dan Pemda dalam mengembangkan Sungai Aeksigeon.

Pada tahap lanjutan dalam metode kualitatif sesuai dengan pendapat dari (Creswell, 2008) dapat mengeksplorasi data tentang sungai Aeksigeon berdasarkan sejarah, waktu, pola hidup warga dan relasinya dengan prioritas Pemda dalam pengembangan wisata di Kota Tarutung. Rangkaian komponen diatas menjadikan tingkat validasi dari penelitian menjadi lebih sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian ini juga mencakup tentang unit analisis yang berada pada tataran meso (menengah). Peneliti melihat bagaimana relasi antara masyarakat sekitar dalam bekerjasama antar individu dan kelompok untuk pengembangan wisata sungai Aeksigeon. Begitu juga relasinya dengan masyarakat lokal dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menata dan mengelola Sungai Aeksigeon. Pola relasi diatas antar individu dengan individu, individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok mampu untuk menjelaskan permasalahan pengembangan wisata Aeksigeon di Kota Tarutung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Kondisi *Enabling* terhadap Masyarakat Lokal Sungai Aeksigeon untuk Pengembangan Wisata

Dalam pengamatan peneliti dalam observasi dan pengambilan data masih sedikit perhatian dari masyarakat lokal maupun pemerintah untuk Sungai Aeksigeon. Kondisi ini menjadi sesuatu yang wajar terjadi pada suatu objek wisata tertentu kalau memang skema perubahan tidak dilakukan. Skema perubahan ini berdampak pada munculnya inisitaif warga

untuk saling bekerjasama dalam memperbaiki kondisi sungai Aeksigeaon sebagai objek wisata unggul. Hal ini telah dijelaskan dalam penelitian dari (Kurniawati et al., 2013) bahwa *Enabling* memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dalam memperbaiki lingkungan sekitarnya dengan mengedepankan inisiatif dan kerjasama. Penting dalam hal ini menekankan pada poin inisiatif yang diawali dengan kesadaran beberapa individu yang memiliki kepekaan pada sungai Aeksigeaon. Kehadiran dari beberapa individu yang memiliki kesadaran membangkitkan niat untuk bekerjasama agar tujuan pengembangan wisata sungai Aeksigeaon tercapai. Dalam pengambilan data dilapangan dengan masyarakat lokal menunjukkan adanya sikap menunggu kehadiran pemerintah dulu dan masyarakat diajak berkolaborasi untuk bersama mengembangkan sungai Aeksigeaon. Kutipan wawancara dengan informan boru Silalahi menjelaskan kondisi *enabling* yang masih jauh dari harapan terjadi seperti berikut ini yaitu:

Sampai saat ini, saya tidak pernah mendengar ada pelatihan atau wadah untuk masyarakat dibekali pengetahuan tentang kebersihan dan pengembangan Sungai Aeksigeaon ya, atau bahkan pernah ditawarkan juga tidak, jadi kami sebagai pedagang fokus saja berdagang, kala pengunjung datang untuk makan ya kami layani dengan sopan.

Pernyataan dari informan pedagang diatas berkaitan dengan pernyataan lanjutan dari informan boru Hutagalung tentang sungai Aeksigeaon seperti berikut ini:

Bagaimana bisa masyarakat ikut ambil bagian dalam pengembangan wisata kalau tidak ada program yang berjalan atau bagaimana bisa program dijalankan pemerintah kalau tidak melibatkan masyarakat lokal sungai Aeksigeaon

Bahkan lebih lanjut informan Pak sitompul mneyatakan sangat kurang inisitif dari masyarakat lokal sungai Aeksigeaon dalam

mewujudkannya sebagai objek wisata seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

Masyarakat memang kurang aktif karena kurang kesadaran aja sebenarnya, masyarakat tidak mempunyai kepedulian yang penuh terhadap Aeksigeaon ini, ya kalau ada gotong royong himbauan dari pemerintah ya masyarakat bakal ikut serta, tapi kalau inisiatif untuk kebersihan dan menuju objek wisata yang mandiri masih kurang ya.

Pernyataan dari dua informan diatas telah menggambarkan belum tercipta kondisi *enabling* di lokasi objek wisata sungai Aeksigeaon. Warga dan pedagang cenderung menunggu dalam melakukan inisiatif pengembangan sungai Aeksigeaon. Dalam konsep *enabling* sebagai awal dari pemberdayaan masyarakat justru menekankan pada kesadaran dari beberapa individu yang aktif dalam memperbaiki lingkungannya. Beberapa individu aktif ini menjadi penggagas untuk membentuk kerjasama antar masyarakat lokal dan mendorong kesadaran kolektif untuk melihat adanya potensi yang menguntungkan dalam pengembangan wisata Sungai Aeksigeaon. Kutipan wawncaa diatas justru masyarakat masih belum memiliki aktor memulai perubahan dan belum berinisiatif dalam melakukan perubahan. Disinilah pentingnya kondisi *enabling* harus dilakukan melalui intervensi pada beberapa orang yang memang memiliki perhatian khusus pada sungai Aeksigeaon. Hasil kerja mereka yang dilihat oleh masyarakat lokal dan para pedagang dapat memantik keinginan warga lain untuk turut berpartisipasi untuk melakukan kerjasama mengembangkan Sungai Aeksigeaon. Penciptaan kondisi *enabling* dapat terus dilakukan dalam mengupayakan keberhasilan objek wisata sungai Aeksigeaon untuk menjadi wujud keberhasilan kerjasama warga secara mandiri di masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sungai Aeksigeaon pada Dimensi Sosial, Ekonomi, Psikologi dan Politik sebagai Objek Wisata

Kondisi enabling tidak menentukan keberlanjutan dari usaha memperbaiki masalah yang ada dilingkungan. Langkah pemberdayaan menjadi proses yang dilakukan untuk memperkuat seluruh tatanan struktur masyarakat lokal agar dapat mengembangkan lingkungannya secara maksimal. Pada proses pemberdayaan terdapat beragam dimensi yang harus dikuatkan diperbaiki secara bersamaan. Dimensi yang diberdayakan meliputi sosial, ekonomi, psikologi dan politik sehingga lengkap dan terintegrasi. Pemberdayaan pada satu atau beberapa dimensi saja dapat berakibat fatal pada gagalnya pengembangan potensi lingkungan yang sedang dikerjakan secara bersama. Memaksimalkan setiap dimensi masyarakat ini menjadi inti yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan pada dimensi sosial menekankan pada adanya terwujud suatu ikatan yang kuat antara satu individu dengan individu lain maupun individu dalam kelompok masyarakat. Masyarakat diikat atas kerjasama yang telah terbentuk dan memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan perbaikan lingkungan mereka tinggal (sungai Aeksigeaon). Pada penelitian ini sisi dimensi sosial masyarakat lokal masih kurang terlihat dari kutipan wawancara dengan boru Silalahi menyatakan:

Saya harapkan pemerintah lebih tegas dan masyarakat juga sadar karena seperti ini kalau hanya beberapa orang yang sadar atau hanya kami yang sadar pasti timbul kejenuhan dan kebosanan, jadi ego bertambah seperti itu, jadi harus gayung bersambut seperti itu.

Pernyataan atas kontribusi pada objek wisata sungai Aeksigeaon diatas lebih menonjolkan kejenuhan dan rasa buntu karena tidak terjalin kerjasama yang kuat oleh beberapa individu yang terukur dan terencana. Jadi beberapa inisiatif masyarakat lokal masih dilakukan secara spontanitas dan sporadic sehingga konsistensi intervensi pada Sungai Aeksigeaon hanya dilakukan dalam jangka waktu sebentar. Kondisi ini juga dikuatkan

dalam kutipan wawancara dengan Pak Sitompul berikut ini:

Saya Cuma bisa memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan saya, dalam artian say tidak merusak lingkungan dan tidak semakin merusak, saya usahakan tidak membuang sampah ke Aeksigeaon dan saya mendidik anak-anak saya atau saya menghimbau orang-orang dekat saya dan pemerintah tentunya supaya melaksanakan kebijakan dan merealisasikannya.

Pemberdayaan dimensi ekonomi merujuk pada terciptanya akses dan peluang untuk mendapat materi dari sektor ekonomi setelah Sungai Aeksigeaon stabil dan jumlah pengunjung besar untuk menikmati pemandangan sungai. Pada kondisi Aeksigeaon sekarang masih sulit untuk menikmati sisi ekonomi ini karena mengingat kesadaran wisata, inisiatif kerjasama dan fasilitas Aeksigeaon yang masih kurang. Namun, sebenarnya masyarakat sudah dapat menangkap manfaat ekonomi kalau sungai Aeksigeaon dapat berhasil menjadi wisata unggul di Kota Tarutung. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara dari Pak Nababan berikut ini:

Jikalau Aeksigeaon menjadi tempat rekreasi pasti berdampak bagi kami juga kan, bagi masyarakat menambah pendapatan, masyarakat yang diberikan hak untuk mengelola contohnya: adanya nai rakit dari bambu yang disewa, ya masyarakat kan merasakan manfaatnya kan.

Bahkan dalam pernyataan dari Pak Hutagalung menunjukkan dalam kondisi sungai Aeksigeaon sekarang masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya secara ekonomi melalui usaha kuliner di pinggir tanggul sungai. Hal ini terlihat dalam kutipan wawancara dengan pak Hutagalung berikut ini yaitu:

Kita lihat bersama pedagang kuliner diberikan tempat untuk berdagang sebagai tempat pengunjung atau masyarakat juga kan sembari

menikmati udara baik pagi, siang atau malam di tanggul sungai.

Dengan demikian potensi ekonomi cukup menjanjikan bagi masyarakat lokal sungai Aeksigeaon untuk menambah pendapatan keluarga. Dari manfaat ekonomi ini tentunya dapat menjadi semangat bagi masyarakat lokal untuk lebih mengembangkan menjadi objek wisata yang dikelola secara baik dan profesional dengan kerjasama antar individu dan kelompok dalam masyarakat.

Pemberdayaan psikologis warga diwujudkan dengan rasa kebanggaan dan kepuasan atas hasil dari kerjasama masyarakat dalam mengembangkan Aeksigeaon. Kebanggaan ini terlihat dalam bentuk kehadiran dari banyak pengunjung yang terlihat nyaman di Sungai Aeksigeaon untuk menikmati keindahan serta fasilitas yang tersedia. Banyaknya apresiasi dan komentar positif menjadi bentuk kebanggaan masyarakat lokal sungai Aeksigeaon. Namun, kondisi ini belum bisa dicapai karena masih sekedar sungai yang belum dikelola baik dan banyaknya sampah yang tersebar di pinggiran sungai. Realitas ini justru memberikan harapan pada masyarakat lokal untuk lebih termotivasi untuk mengembangkan sungai Aeksigeaon untuk menjadi tempat wisata kebanggaan Kota Tarutung. Dalam wawancara dengan Pak Nababan sebenarnya sudah ada tersirat sedikit tentang kebanggaan pada sungai Aeksigeaon yang berada di pusat Kota Tarutung. Berikut kutipan wawancara dengan Pak Nababan yaitu:

Aeksigeaon ini adalah kekayaan kota Tarutung dimana Tarutung harusnya bangga karena kota ini dibelah oleh sungai dan menurut saya hanya ada beberapa kota yang ibukotanya dibelah oleh sungai yang bervolume besar seperti Aeksigeaon ini dan menurut saya Aeksigeaon berpotensi menjadi objek wisata yang sangat bagus dapat dijadikan seperti wisata bermain anak dan keluarga.

Perasaan bangga juga disampaikan oleh ibu boru Lumbantobing selaku pedagang di

sekitar sungai Aeksigeaon yang diuraikan dalam kutipan wawancara berikut ini yaitu:

Aeksigeaon adalah sebuah objek yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai objek wisata, kenapa karena memiliki peluang yang besar disisi lain tanggul sungai ini adalah wajah kota tarutung dan tentunya sangat berdampak bagi kami para pedagang.

Berdasarkan kutipan wawancara kedua informan diatas menjadi bangga menjadi bagian dari Aeksigeaon yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Dengan kebanggaan terhadap sungai Aeksigeaon menjadi dasar yang bagus untuk melibatkan masyarakat lokal untuk melakukan kerjasama mengembangkannya menjadi objek wisata. Para inisitaor tidak perlu lagi memupuk rasa bangga (bounding) pada sungai Aeksigeaon karena sudah ada dalam hati dan pikiran masyarakat lokal. Tidak semua tempat objek wisata bisa langsung muncul rasa bangga dan memilikinya karena butuh hal positif dari tempat itu agar individu terikat dengannya. Realitas ini dapat lebih bertumbuh dan besar lagi pada semua masyarakat lokal kalau sungai Aeksigeaon menjadi wajah baru kebanggaan Kota Tarutung.

Pemberdayaan dimensi politik berdasarkan adanya hasil nyata yang telah terlihat dari pengembangan sungai Aeksigeaon untuk memberikan legitimasi kuat secara politik. Pemberdayaan politik ini mengaitkan tentang adanya posisi daya tawar yang kuat dimiliki oleh masyarakat lokal untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah, organisasi masyarakat maupun pihak swasta. Masyarakat lokal telah membuktikan hasil kerja dengan kehadiran banyak wisatawan dan bukti fisik atas pengelolaan objek wisata. Namun kondisi ini masih belum terjadi pada masyarakat lokal Sungai Aeksigeaon karena belum adanya pengelolaan yang baik dan belum menjadi wisata prioritas di Tarutung. Kenyataan ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat lokal seperti kutipan wawancara berikut ini dari Ibu Silalahi yaitu:

Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat masih kurang terbukti dengan kurangnya program atau kebijakan pemerintah dan disamping itu kami sebagai masyarakat kurang sadar atas kebersihan dan pengembangan Aeksigeaon.

Hal senada juga disampaikan oleh pak Nababan terkait inisiatif dalam pengembangan Aeksigeaon oleh masyarakat lokal seperti dalam kutipan berikut ini:

Sebenarnya di Taruung sudah ada lembaga pengwadahan untuk masyarakat yaitu kelompok sadar wisata tetapi khusus untuk Aeksigeaon ini belum ada outputnya atau belum terwujud perhatian lembaga ini terhadap Aeksigeaon.

Kondisi yang disampaikan oleh Pak Nababan diatas mirip dengan pernyataan dari pada sesi wawancara dengan Pak Pardede berikut ini:

Menurut saya, khusus untuk Aeksigeaon ini belum ada program pariwisata karena pemerintah fokus pada objek wisata yang sudah ada seperti salib kasih, situmandi dan lain-lain.

Pernyataan informan diatas meunjukkan kesamaan dan saling menguatkan dari satu pernyataan ke pernyataan lainnya atas tanggapan perhatian masyarakat lokal maupun pemerintah daerah. Hal ini tidak terlepas dari pemberdayaan politik belum berjalan secara maksimal pada masyarakat lokal sungai Aeksigeaon. Antar warga masih sulit untuk membentuk wadah organisasi dan pemerintah juga belum memprioritaskan program dan kebijakan untuk sungai Aeksigeaon. Posisi tawar yang lemah secara politik dan belum terlihatnya bentuk kerja dalam pengembangan Aeksigeaon menyulitkan mendapatkan perhatian dari masyarakat lokal dan pemerintah. Dalam hal inilah kebutuhannya insiatif dulu dari warga memuli pengembangan baru menjadi legitimasi kuat untuk menggandeng masyarakat lokal dan pemerintah secara bersamaan.

Protection (Perlindungan) dari Pemerintah dalam Mewujudkan Pengembangan Wisata yang Berkelanjutan

Pelembagaan atas hasil kerja yang telah dilakukan oleh masyarakat menjadi wujud dari perlindungan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat lokal. Proteksi menjadi penting peranya untuk masyarakat agar mendapatkan suntikan dana, pelatihan dan aturan hukum yang menguatkannya. Pada posisi sungai Aeksigeaon sekarang dapat terlihat jelas proteksi belum terlihat sama sekali dari pemerintah. Proteksi dapat berupa pembentukan kelompok masyarakat (kelompok sadar wisata) untuk menjadi motor penggerak pengembangan Sungai Sigeaon. Kemudian, pemerintah juga dapat menetapkan secara aturan maupun perencanaan daerah untuk memprioritaskan ssungai Aeksigeaon sebagai wisata yang dikembangkan. Kondisi diatas masih sangat sulit direalisasikan dan ini dikuatkan dari hasil wawancara dengan Pak Nababan berikut ini:

Sebenarnya di tarutung sudah ada lembaga pengwadahan untuk masyarakat yaitu Kelompok Sadar Wisata etapi khusus untuk Sungai Aeksigeaon ini belum ada karena belum ada perhatian lembaga ini pada sungai Aeksigeaon.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Huataglung terakit kebijakan pemerintah tentang Aeksigeaon dalam kutipan wawancara berikut ini:

Masyarakat tidak dapat ikut ambil bagian kalau tidak ada program atau bagaimana bisa program berjalan tanpa masyarakat. Kemudian, kalau ada ide dan pemerintah menampung akan muncul kebijakan dan masyarakat pasti siap mendukung dengan catatan program jelas dan masyarakat di fasilitasi.

Bentuk proteksi pemerintah daerah kepada Sungai Aeksigeaon masih sulit direalisasikan terakit aturan pengelolaan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak dapat

bergerak luwes kalau pengelolaan DAS masih belum secara penuh di tangan pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten kesulitan memasukkan dalam perencanaan daerah maupun penganggaran karena bukan bagian dari wilayah kewenangannya. Pemerintah daerah tetap turut andil dengan melakukan pengajuan proposal pada pihak provinsi dan segera dapat perhatian mereka untuk ditindaklanjuti. Akibat paling fatal adanya terlihat kurang diperhatikannya sungai Aeksigeaon dan pemerintah daerah harusnya bisa mengelola dengan baik asal disertai penguatan kewenangan.

Ambivalensi Aturan Pengelolaan DAS oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat

Kurang optimalnya pengelolaan sungai Aeksigeaon di Kota Tarutung tidak terlepas dari tumpang tindihnya aturan terhadap daerah aliran sungai (DAS). Secara logis sungai Aeksigeaon yang berada di Kota Tarutung harusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah kabupaten setempat. Namun hal ini ternyata berbeda dalam kerangka aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah karena pemerintah daerah tidak diberik kewenangan dalam mengelola DAS yang ada di wilayahnya. Hal ini terlihat dari penelitian dari (Aryani et al., 2020) bahwa dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan DAS. Pengelolaan DAS di wilayah kabupaten tetap menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi dan pusat sesuai aturan yang ada. Mengacu pada permasalahan pengelolaan DAS sebenarnya telah ada pengaturan ideal untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya aturan baru melalui UU No 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. UU NO 17 Tahun 2019 dapat menutupi kelemahan UU pemerintah daerah karena pemerintah Kabupaten/Kota diberikan tugas dan kewenangan terakit pengaturan dan pengelolaan DAS terkhusus pada pasal 15 dan 16. Begitu juga dengan UU Konservasi Tanah

dan Air berkaitan dengan penyelenggaraan konservasi tanah dan air maka diberikan kewenangan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten /Kota.

Pada posisi ini wajar menurut peneliti kalau pemerintah daerah Kabupaten Tarutung tidak melibatkan diri dalam banyak kegiatan terkait pengelolaan Aeksigeaon. Hal ini dianggap diluar kewenangan pemerintah kabupaten dan sulit membuat penganggaran dana dalam mengelola Aeksigeaon karena diluar kewenangan pemerintah Kabupaten. Implikasi dari tumpang tindih aturan ini justru sangat besar pada Aeksigeaon dan masyarakat sekitarnya. Sungai Aeksigeaon yang berada tepat di jantung Kota Tarutung justru terlihat tidak terkelola baik dan diabaikan dan tidak ada aturan jelas untuk menertibkan pelanggaran yang terjadi di dalamnya. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Lurah Hutatoruan X pak Lumban Tobing berikut ini:

Sebelumnya Aeksigeaon ini berada di naungan Balai Provinsi dan Pemkab Tapanuli Utara sudah mengajukan Program Pembangunan Dam dan pengembangan Aeksigeaon menjadi objek wisata yang dilengkapi dengan fasilitas. Pemerintah kabupaten pastinya menginginkan yang terbaik untuk kota ini, tetapi karena bukan dibawah pemkab secara langsung maka pemerintah pemkab enggan mengeluarkan dana atau anggaran untuk Aeksigeaon, bukan berarti lepas tangan, pemkab tetap mengajukan program tetap kita tunggu saja sampai mendapat perhatian dari Provinsi.

Implikasi wewenang kelola yang terlalu jauh berdampak pada Sungai Aeksigeaon yang diperlakukan kurang baik oleh wisatawan yang datang dengan serangkaian perlakunya. Hal ini dijelaskan adlam hasil wawancara dengan Ibu Hutagalung seperti berikut ini:

Liat saja orang-orang yang bersantai di pinggir sungai langsung duduk sambil ditembol pinggir sungai, sambil makan dan sampahnya langsung

dibuang ke bawah atau dibiarkan disitu karena kurang tempat sampah dan tempat duduk itu sebenarnya pot-pot bunga, masyarakat aja yang kurang menjaga, bunga-bunga yang ditanam hanya bertahan satu minggu saja karena tempatnya sudah dijadikan tempat duduk.

Realitas dari wawancara diatas menunjukkan adanya masalah pada aturan kewenangan pengelolaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Implikasinya pengelolaan tidak dapat dilakukan maksimal pada sungai Aeksigeon dan merusak sungai atas kurangnya monitoring dari pihak berwenang.

Pemberdayaan (*Empowering*) Masyarakat dalam Mengembangkan Objek Wisata Aeksigeon

Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat tidak terlepas dari adanya kekurangan dalam sumber daya manusia dalam memanfaatkan peluang dilingkungannya. Menumbuhkan kesadaran membutuhkan proses bertahap dan panjang sehingga masyarakat menjadi paham keuntungan yang mereka mampu peroleh atas lingkungan yang mereka miliki. Dalam hal ini, objek wisata Aeksigeon menjadi bukti empiris atas ketidakmampuan warga sekitar untuk sadar atas potensinya secara ekonomi dan ruang sosial bagi Kota Tarutung. Dalam penelitian potensi pengembangan objek wisata Aeksigeon dapat diwujudkan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat lokal melalui pemberdayaan (*empowerment*). Dalam (Joo et al., 2020) dijelaskan bahwa *empowerment* mengacu pada upaya individu atau kelompok untuk mendapatkan control atas nasib mereka melalui peningkatan kompetensi mereka dan berdampak pada lingkungannya (sungai Aeksigeon). Lebih lanjut dijelaskan pemberdayaan mampu mengubah individu menjadi agen aktif yang bertindak berdasarkan nilai dan minat mereka. Dengan demikian tindakan individu biberdayakan untuk mampu memecahkan masalah utama mereka dan kelompok mereka hadapi dan mengubah komponen sosial yang menjadi sumber masalahnya.

Pada penggunaan konsep tentang pemberdayaan (*empowerment*) terdapat empat jenis pemberdayaan masyarakat yaitu: pemberdayaan sosial, ekonomi, psikologis dan politik. Berdasarkan penjelasan dari Scheyvens dalam (Joo et al., 2020) mengatakan **pertama**, pemberdayaan sosial terjadi ketika warga menjadi terikat satu sama lain dan bekerjasama dalam mewujudkan pengembangan wisata yang ada di lingkungannya. **Kedua**, pemberdayaan ekonomi mengacu pada pemanfaatan moneter (keuangan) ke seluruh masyarakat lokal dengan ditandai adanya bukti nyata atas peningkatan kualitas hidup mereka. **Ketiga**, pemberdayaan psikologis berkaitan dengan peningkatan rasa kebanggaan dan harga diri dari masyarakat lokal saat wisatawan menghargai Aeksigeon dan memuji keberadaan Aeksigeon sebagai kebanggaan Kota Tarutung yang dilihat banyak masyarakat luas. **Terakhir**, pemberdayaan politik mengacu pada adanya kesadaran dalam diri masyarakat lokal tentang perkembangan pariwisata Aeksigeon melalui masyarakat dan menjadi bukti nyata kerja yang mereka lakukan bersama.

Merujuk pada konsep pemberdayaan diatas memberikan kita gambaran jelas tentang beragam dimensi yang harus diperbaiki dalam pengembangan wisata. Dalam hal ini Sungai Aeksigeon telah menjadi objek wisata yang minim pengelolaan dan membutuhkan peran aktif dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian dari (Darsiharjo et al., 2016; Renaldy et al., 2018; Wisudawati, 2017) bahwa keaktifan dari masyarakat lokal dalam turut berpartisipasi dalam aktivitas usaha wisata mampu mempercepat perkembangan objek wisata. Secara pemberdayaan sosial, ekonomi, psikologis dan politik masih minim terlihat dalam masyarakat lokal yang ada di objek wisata Aeksigeon.

Dalam hal ini masyarakat lokal tidak dapat disalahkan secara sepihak dikarenakan memang butuh suatu kondisi yang membuat mereka berinisiatif untuk berperan aktif dalam kegiatan usaha wisata. Memantik inisiatif warga lokal di Aeksigeon dapat

dilakukan melalui pemberdayaan yang lengkap seperti pemberdayaan ekonomi, sosial, psikologi dan politik. Apabila semua komponen diatas terpenuhi maka masyarakat lokal Sungai Aeksigeaon dapat berjalan sendiri dan mandiri karena nyata manfaat yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tiga Jalur Pemberdayaan Masyarakat Pada Objek Wisata Sungai Aeksigeaon di Kota Tarutung

Sebagaimana dalam melakukan perubahan dalam memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat maka dibutuhkan skema sosial tertentu. Dalam hal ini skema untuk melakukan perubahan dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat mandiri dan mencari solusi atas permasalahan di lingkungannya. Skema sosial diatas sesuai dengan pemberdayaan masyarakat oleh Sumodinigrat dalam (Kurniawati et al., 2013) yaitu: **pertama**, *enabling* mengacu pada menciptakan kondisi dan iklim sosial yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang melalui kreativitas yang dimilikinya serta kerjasama yang terbentuk di dalamnya. **Kedua**, *empowering* atau pemberdayaan menguatkan potensi kekuatan yang sudah dimiliki oleh masyarakat agar menjadi mandiri dan berkembang dalam mencapai tujuan individu maupun kelompok di masyarakat. **Ketiga**, *protecting* mengacu pada perlindungan yang erat hubungannya dengan kerjasama dengan pemerintah melalui serangkaian kebijakan dan perhatian yang ditujukan langsung kepada masyarakat yang telah ditentukan.

***Enabling* (Memungkinkan)**

Bila masyarakat ditunggu untuk melakukan inisiatif dalam melakukan perubahan pada kondisinya membutuhkan waktu yang lama dan tidak pasti. Keadaan ini menjadi sulit mengharapakan munculnya perubahan signifikan dan positif di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menekankan konsep *enabling* yang memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat dalam menciptakan perubahan yang baik. Peluang ini tidak dapat diraih tanpa adanya usaha yang dilakukan

oleh individu, kelompok masyarakat maupun pemerintah. Peluang dalam hal ini dihubungkan dengan menciptakan kondisi masyarakat yang mulai menumbuhkan kesadaran tentang adanya masalah yang muncul disekitarnya. Masalah ini bisa saja baru ataupun sudah lama dan tidak pernah menjadi perhatian serius oleh masyarakat lokal. Posisi masalah ini membutuhkan kondisi *enabling* yang memberikan peluang yang baik untuk memberikan kesempatan pada individu maupun kelompok masyarakat menjadi sadar atas masalah bersama yang mereka hadapi.

Penciptaan kondisi *enabling* melalui skema sosial yang harus dibangun secara bersama-sama di dalam masyarakat. Masyarakat terlebih dahulu diisi dengan pengetahuan tentang masalah yang mereka hadapi di lingkungannya. Setelah mereka memiliki pengetahuan maka masyarakat sudah tumbuh kesadaran untuk mulai melakukan perubahan. Perubahan ini nantinya dapat direalisasikan dengan ikatan kerjasama antar individu maupun dalam kelompok di masyarakat. Secara kelompok mereka saling berbagi argument dan kendala yang dihadapi di dalam proses mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Kondisi ketidakmampuan mengatasi masalah dan tidak memiliki *sense* terhadap masalah dilingkungan ditimbulkan oleh kekurangan sumber daya manusia. Hal ini ditegaskan dalam penelitian dari (Anak Agung Putu Agung, 2013; Darsiharjo et al., 2016; Dian et al., 2016; Pauziah, 2017) bahwa kelemahan dalam pengembangan objek wisata selalu dibarengi dengan sumber daya manusia yang rendah. Peningkatan SDM menjadi kunci yang memberikan kemungkinan bagi masyarakat lokal untuk dapat berinisiatif dan memulai perubahan di lingkungannya (Simangunsong et al., 2021). Dalam penelitian perubahan dapat terjadi dengan adanya proses *enabling* di dalam masyarakat. Masyarakat lokal Sungai Aeksigeaon diberikan peluang melalui peningkatan pengetahuan tentang pengembangan objek wisata. Pengetahuan yang baik tentang wisata memberikan kesadaran pada masyarakat untuk mulai

melakukan inisiatif perubahan. Masyarakat juga mulai melakukan kerjasama baik dalam segi pengelolaan, menjaga kebersihan dan keamanan sehingga wisatawan merasa nyaman di sungai Aeksigeaon. Hasil dari kerjasama masyarakat lokal memberikan ikatan solidaritas dan kepercayaan tentang nilai yang dapat mereka capai atas sungai Aeksigeaon. Dengan demikian, peluang sudah tercipta dan kesadaran juga sudah mulai terbentuk yang memungkinkan dilakukan pemberdayaan masyarakat untuk tahapan lanjutan.

Empowerment (Pemberdayaan)

Pada tahapan pemberdayaan lebih menekankan pada penguatan pada banyak dimensi struktur sosial masyarakat. Pada **dimensi sosial** menekankan pada pola interaksi yang dapat dibentuk dalam masyarakat. Masyarakat perlu diikat oleh satu tujuan bersama dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungannya. Keterikatan ini berdampak pada terjalannya kerjasama yang baik sehingga tercipta perasaan saling memiliki dan menghargai antar individu. Masyarakat tidak lagi berjalan secara sendiri tetapi sudah ada tujuan bersama yang dapat mengarahkan tindakan kelompok dalam memecahkan masalah. Dalam **dimensi ekonomi** mengacu pada manfaat langsung berupa secara materi yang didapatkan dalam relasi kerjasama yang mereka hasilkan dalam masyarakat. Kondisi awal sebelum adanya kerjasama dan terbentuknya kerjasama terdapat banyak kesulitan kehidupan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Setelah adanya pemberdayaan sosial dan ekonomi secara perlahan dirasakan keuntungan materi yang mereka dapatkan sebagai hasil dari kerjasama yang telah terbentuk. Materi yang mereka peroleh akhirnya dapat memperbaiki kehidupan dan memperoleh peluang ekonomi yang beragam di lingkungan mereka. Hal ini tidak terlepas dari adanya kondisi yang baik dan kondusif yang memungkinkan hadirnya peluang ekonomi secara parallel.

Pada dimensi psikologis lebih ditujukan pada perasaan *pride* (kebanggaan) dan *satisfying* (kepuasan) yang muncul dalam diri individu yang turut aktif setelah melihat

keberhasilannya. Bentuk apresiasi kecil yang diberikan oleh masyarakat sekitar, pengunjung, pejabat dan tokoh politik menjadi kebanggaan dan kepuasan sendiri bagi mereka yang terlibat. Mereka menyadari kalau apresiasi yang diberikan oleh banyak pihak tidak muncul secara tiba-tiba tetapi ada proses panjang dan berat yang telah dilalui bersama. Perasaan bersama ini menguatkan diri mereka untuk makin mencintai produk dari yang mereka buat dan menstimulus untuk mengembangkannya menjadi lebih baik. Terakhir, dimensi politik berhubungan dengan kekuasaan dan rekognisi dari struktur yang lebih besar (pemerintah desa, pemda, pemprov, pemerintah pusat). Seluruh rekognisi ini didapatkan dari hasil kerja nyata yang telah dilakukan dari awal sampai akhir. Masyarakat lokal sekarang telah memiliki jaringan sosial yang dapat mereka manfaatkan dalam mengakses banyak kemudahan di dalam masyarakat. Mereka dapat menggunakan jaringan ini untuk pengembangan dari produk yang dihasilkan. Bahkan, sekarang mereka sudah memiliki legitimasi yang kuat untuk diakui oleh masyarakat luas tentang pengembangan produk yang telah dihasilkan.

Seluruh dimensi struktur sosial diatas menjadi proses yang berjalan dengan diawali memungkinkannya masyarakat untuk diberdayakan dalam masyarakat. Peluang sudah memungkinkan dan dilanjutkan pemberdayaan pada dimensi sosial, ekonomi, psikologis dan politik yang didapatkan secara bersamaan dalam prosesnya. Pernyataan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menciptakan peluang yang memungkinkan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah sosial dan mengembangkan potensi mereka. Hal ini ditegaskan dalam penelitian dari (A.S.L.P.Putri, 2016; Pauziah, 2017; Renaldy et al., 2018; Riska Aprilia Ayuningtyas D, 2017) menyatakan peluang adri masyarakat untuk mengembangkan wisata tercipta dari adanya kesempatan yang sama untuk individu dalam berpartisipasi memecahkan masalah dilingkungannya. Masalah pada objek wisata Aeksigeaon menjadi masalah bagi masyarakat

lokal, namun mereka diberi kesempatan dan memungkinkan untuk menumbuhkan kesadaran atas potensi dari Aeksigeaon. Dengan demikian sungai Aeksigeaon tidak lagi sekedar sungai yang membelah Kota Tarutung tetapi berdampak secara sosial, ekonomi, psikologi dan politik mereka. Penciptaan pada kondisi yang memungkinkan untuk masyarakat lokal berperan aktif dan sadar menjadi pekerjaan bersama dalam pengembangan sungai Aeksigeaon.

Protecting (Perlindungan)

Tahapan terakhir ini menentukan keberlanjutan dan konsistensi dari hasil yang telah diraih bersama oleh masyarakat. *Protecting* manifestasi dari usaha yang dilembagakan oleh struktur formal dan lebih besar untuk menguatkan kemandirian dari masyarakat. Masyarakat yang telah diberdayakan dalam beragam dimensi kehidupan membutuhkan penguatan status hukum dan kebijakan dari pemerintah. Kebijakan dan intervensi langsung melalui program pemerintah memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan hasil produk kerja yang telah dilakukan bersama. Masyarakat memiliki pijakan jelas dalam melangkah untuk melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pelatihan, pendanaan dan membentuk lembaga formal. *Protecting* dari pemerintah memastikan keberhasilan yang telah diperoleh tidak berjalan stagnan dan tidak berkembang. Melalui *protecting* masyarakat menjadi sadar kalau mereka diperhatikan dan diapresiasi melalui kebijakan langsung oleh pemerintah kepada mereka. *Protecting* menjadi output akhir yang dapat diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan hasilnya. Dalam hal ini masyarakat tidak lagi menjadi entitas terpisah dari pemerintah dan sudah terintegrasi. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat langsung berdampak pada keberlanjutan hasil yang telah dilakukan dan dipastikan melalui mekanisme formal dari lembaga pemerintah yang terkait.

Berkaca pada objek wisata sungai Aeksigeaon masyarakat cenderung belum terbentuk kerjasamanya dan pemerintah daerah juga

belum menyentuh akar rumput secara langsung. Realitas ini tidak menutup harapan terhadap terbentuknya kerjasama yang melembaga antara masyarakat lokal Aeksigeaon dengan pemda di masa depan. Dampak dari kerjasama langsung antara pemerintah dengan masyarakat lokal justru menjadi manifestasi keberhasilan objek wisata tertentu. Bentuk keberhasilan ini ditemukan dalam beberapa penelitian dari (Azwar, 2017; Irsyad, 2020; Purnaya, 2018; Putryanda, 2018) bahwa dengan adanya kerjasama langsung pemerintah dengan masyarakat lokal pengembangan objek wisata cepat terwujud.

Pernyataan diatas menguatkan peneliti untuk menyatakan pemerintah dan masyarakat dapat berjalan beriringan dalam mencapai banyak hal untuk berkontribusi secara sosial, ekonomi dan politik. Masyarakat tidak lagi menjadi ragu memulai sesuatu yang dimungkinkan dapat dilakukan kerjasama dengan pemerintah. Melalui serangkaian kemungkinan (*enabling*) dan pemberdayaan serta peran pemerintah dalam *protecting* menjadikan agenda masyarakat dapat diwujudkan.

SIMPULAN

Belum adanya aktor gerakan pengembangan masyarakat menyulitkan terciptanya kondisi *enabling* yang memungkinkan masyarakat dapat bekerjasama dalam pengembangan wisata sungai Aeksigeaon

Masyarakat belum memiliki kesadaran atas potensi pengembangan wisata Aeksigeaon

Pada pemberdayaan dimensi sosial individu bergerak secara spontanitas dan tidak konsisten mengakibatkan timbulnya kejenuhan dan ego saat tindakannya tidak dihargai dan diikuti oleh masyarakat lokal lainnya

Masyarakat lebih bertindak untuk lingkup kecil dimana hanya memberikan kontribusi melalui dirinya dan keluarganya tetapi tidak mencegah tindakan wisatawan maupun masyarakat lokal lainnya yang dapat merusak Sungai Aeksigeaon

Manfaat ekonomi sebenarnya sudah dirasakan oleh masyarakat lokal dengan adanya pedagang kuliner di sekitar tanggul sungai Aeksigeaon, namun dampak ekonomi ini masih mampu dinikmati oleh seluruh masyarakat lokal kalau pengelolaan sungai Aeksigeaon dapat dimaksimalkan

Pada pemberdayaan psikologis cukup baik dengan adanya kebanggaan terhadap Aeksigeaon yang berada tepat ditengah Kota Tarutung. Rasa kebanggaan baik untuk menstimulus masyarakat lokal agar lebih peduli dan mau bekerjasama dalam pengemabngan Aeksigeaon di Kota Tarutung.

Pemberdayaan politik masih sulit dilakukan oleh masyarakat lokal dengan belum adanya hasil kerja nyata pengembangan sungai Aeksigeaon untuk melegitimasi posisi tawar terhadap masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta

Pembenatukan Kelompok Sadar Wisata sulit dilakuka oleh pemerintah daerah dan penentuan anggaran kepada sungai Aeksigeaon karena kewenangan pengelolaan belum secara epnuh di tangan Pemerintah Kabupaten

Kurang diperhatikannya sungai Aeksigeaon di Kota Tarutung bukan karena tidak adanya perhatian pemerintah Kabupaten tetapi adanya kewenangan DAS yang di dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi

Dilemma aturan UU pengelolaan DAS dapat disiasati dengan menggunakan UU No 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air UU NO 17 Tahun 2019 dan UU Konservasi Tanah dan Air berkaitan dengan penyelenggaraan konservasi tanah dan air maka diberikan kewenangan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten /Kota.

Akibat dari pengelolaan DAS yang lebih diprioritaskan di provinsi berdampak pada sungai Aeksigeaon yang ditengah Kota Kabupaten cenderung kurang baik pengelolaannya, tidak terdapat fasilitas wisata dan aturan tentang penertiban sampah dan tata kelola sungai yang baik.

Aktor dari masyarakat lokal harus bergerak terlebih dahulu untuk menciptakan kondisi enabling sehing memberikan potensi kerjasama lebih besar dari akar rumput.

Masyarakat lokal harus tumbuh dulu kesadaran di indivdiu untuk memulai kerjasama dalam pengembangan wisata sungai Aeksigeaon.

Pola kerjasama di masyarakat lokal dilakukan secara kolektif dan bukan individu karena dapat menimbulkan kejenuhan dan sifat egois kalau dilakukan dalam waktu yang panjang.

Manfaat sosial dan ekonomi hanya dapat terjadi kalau masyarakat dapat mengembangkan wisata sungai Aeksigeaon secara mandiri mengandalkan masyarakat lokal.

Posisi tawar masyarakat lokal dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah dan swasta dapat dilakukan dengan terlihat dulu bukti nyata kerja pengembangan wisata Aeksigeaon.

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan intervensi penuh dalam pengelolaan sungai Aeksigeaon sebagai bentuk proteksi kalau kewenangan pengelolaan DAS diberikan pada Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah perlu lebih mengkaji lagi tentang aturan pengelolaan DAS yang hanya beradapa di pemerintah Pusat dan Provinsi padahal kebanyakan sungai justru berada pada wilayah Kabupaten dan Kota Madya.

Pemerintah Kabupaten dapat membuat strategi dengan merujuk kepada UU No 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air UU NO 17 Tahun 2019 dan UU Konservasi Tanah dan Air karena pemerintah daerah Kabupaten diberikan kewenangan untuk mengelola sungai.

REFERENSI

- A.S.L.P.Putri, I. (2016). Peran Sungai Pattunuang dalam Pengembangan Ekowisata di Obyek Wisata Alam Pattunuang Assue, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. *Prosiding*

- Seminar Nasional Lahan Basah 2016 Jilid 1 Potensi, Peluang, dan Tantangan Pengelolaan*, 1(1), 362–367.
- Anak Agung Putu Agung, N. N. B. A. (2013). Strategi Pengembangan Muara Sungai Yeh Matan Sebagai Objek Wisata Air Di Desa Tegal Mengkeb Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. *Jurnal Bumi Lestari*, 13(2), 297–306.
- Andrasgoro, D. (2018). Peran Waterfront City Pada Industri Pariwisata Taman Alun Kapuas Kota Pontianak. *JURNAL SWARNABHUMI : Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v3i1.1709>
- Aryani, N., Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2020). Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia (Studi di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 592–614. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art8>
- Azwar, H. (2017). Potensi Pengembangan Daya Tarik Wisata Di Destinasi Pariwisata Ikan Sakti Sungai Jariah Kecamatan Baso Kabupaten Agam. In *Jurnal Pendidikan Dan Keluarga*, 9(1), 54. <https://doi.org/10.24036/jpk/vol9-iss1/45>
- Badan Pusat Statistik Tapanuli Utara. (2019).
- Creswell, J. W. (2008). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (pp. 1–295). SAGE Publications Ltd.
- Darsiharjo, Kastolani, W., & Nayoan, G. N. P. (2016). Strategi Pengembangan Wisata Minat Khusus Arung Jeram Di Sungai Palayangan. *Jurnal Manajemen Resort Dan Leisure*, 13(1), 24–35.
- Dian, M., Mukti, L., Makmur, M., & Adiono, R. (2016). UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di Kawasan Objek Wisata Selomangleng Kota Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1797–1803.
- Irsyad, M. (2020). Kondisi Potensi Wisata di Ekowisata Sungai Mudal Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 4(1), 29–39. <https://doi.org/10.34013/jk.v4i1.36>
- Joo, D., Woosnam, K. M., Strzelecka, M., & Boley, B. B. (2020). Knowledge, empowerment, and action: testing the empowerment theory in a tourism context. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(1), 69–85. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1675673>
- Kurniawati, D. P., Supriyono, B., & Hanafi, I. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 9–14.
- Kusriantari Fenny A, Refranisa, A. M. H. (2020). Satu Atraksi Wisata Pada Kampung Ekowisata Keranggan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(), 349–355.
- Muftadi, A. (2017). Pengembangan Desa Wisata Dan Potensinya Di Kabupaten Pangandaran. *AdBispreneur*, 2(2), 117–124. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v2i2.13163>
- Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Teaching Sociology* (7th ed., Vol. 30, Issue 3). Pearson Education Limited. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Pauziah, P. (2017). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. *JOM FISIP*, 53(9), 1689–1699.
- Purnaya, I. G. K. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Sungai Badung Dalam Upaya Pengembangan Pariwisata di Kota

- Denpasar. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 8(0), 1–8.
- Putryanda, Y. (2018). Melestarikan Bekantan: Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Sungai Rutas, Kabupaten Tapin. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Volume 13, 115–121.
- Qonita Putri Mulya, G. Y. (2018). Analisis Pengembangan Potensi Kawasan Wisata Sungai Musi Sebagai Tujuan Wisata di Kota Palembang. *Cakra Wisata*, 19(2), 41–53.
- Rahayu, I. (2021). Strategi Pengembangan Wisata Mangrove Sungai Ular di Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Sosial dan Tekonologi (SOSTECH)*, 1.
- Renaldy, A., Fithria, A., Aryadi, M., & Kehutanan, J. (2018). Perceptions and aspirations of tourist toward the development of tourist attractions in the village headwaters banyu loksado district headwaters south river. *Jurnal Sylva Scientiae*, 01(2), 171–183.
- Riska Aprilia Ayuningtyas D, S. H. D. (2017). Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 10(1), 1–13.
<https://doi.org/10.22202/js.v3i1.1595>
- Saputra, A. D. (2021). Pengemasan Atraksi Wisata Susur Sungai Klegung dengan Menggunakan Pendekatan Potensi Wisata. *Media Wisata*, 18(1), 113–128.
<https://doi.org/10.36276/mws.v18i1.82>
- Simangunsong, B., Aritonang, H. D., Ariawan, S., Simanjuntak, H., & Harianja, R. (2021). Tanggung Jawab Gereja Membangun Gerakan Eco-literacy di Kaldera Toba UNESCO Global Geopark. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, 5(2), 262–275.
- Sugiarto, E. C. (2019). *Pariwisata, lokomotif baru penggerak ekonomi Indonesia*.
- Wisudawati, N. N. S. (2017). Pengembangan Daya Tarik Wisata Sungai di Kota Denpasar Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Sungai Loloan di Kawasan Mertasari, Sanur Kauh). *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 8(0).
- Yuliyani, S. (2020). Upaya Warga Masyarakat Dusun Bembem Trimulyo Jetis Bantul Dalam Mewujudkan Sungai Opak Sebagai Wisata Sungai (River Tourism). *Hotelier Journal*, 6, 12–22.